

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan yang handal dan profesional. Sebagai bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci sumber pembiayaan program-program yang akan dilaksanakan. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik. Tentu setiap anggaran yang telah disusun oleh pemerintah semestinya mencapai tujuan dengan terlaksananya program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Tantangan utama bagi pembangunan Indonesia bukan lagi untuk memberikan dana kepada daerah-daerah yang lebih miskin tetapi bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut menggunakan dana yang disalurkan dengan sebaik-baiknya. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lebih dari setengah kenaikan alokasi DAU yang seharusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan kepada masyarakat digunakan untuk membiayai belanja pegawai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan pembayaran gaji pegawai daerah secara penuh melalui DAU ini tidak mendorong pemerintah daerah mengarahkan dana itu untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

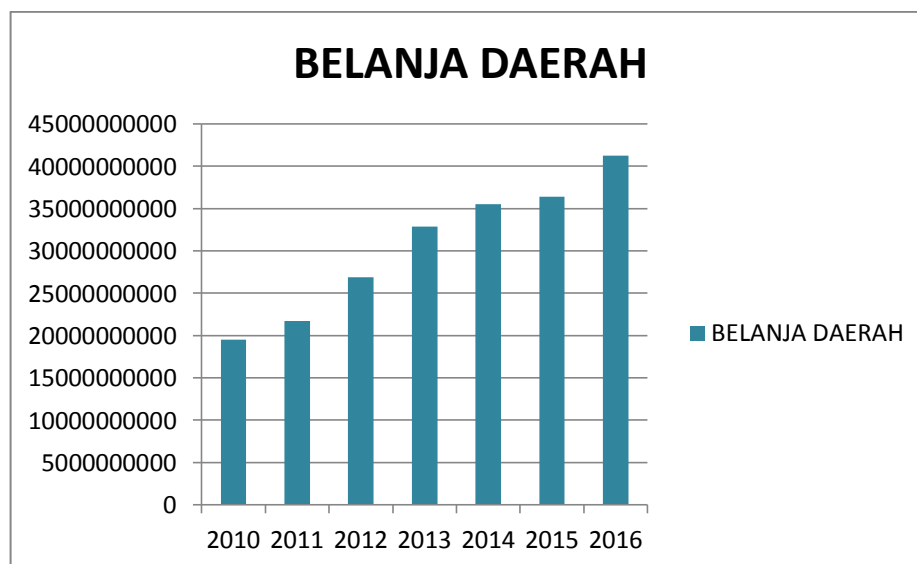
Dalam Dana Alokasi Umum ini tidak terdapat batasan mengenai bagaimana dana tersebut dibelanjakan, sehingga daerah dapat dengan leluasa memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan yang diinginkan. Namun, masalah yang muncul adalah kemampuan daerah dalam mengelola DAU. Apabila daerah kurang mampu mengelola dana tersebut, maka tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah semakin meningkatnya ketergantungan daerah pada dana perimbangan. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum yang dominan untuk belanja pegawai dapat berdampak pada berkurangnya alokasi belanja modal, pelayanan publik, ataupun berkurangnya alokasi dana untuk program penanggulangan kemiskinan. Atas pemanfaatan DAU maka pemerintah daerah selayaknya mengalokasikan DAU dengan baik dan bijak dalam setiap realisasi belanja daerah. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada penelitian Devita, dkk (2014) dan Awaniz (2011), namun kontradiktif dengan hasil penelitian Sari (2013) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Selain Dana Alokasi Umum sebagai salah satu penerimaan pemerintah daerah, pembiayaan keuangan daerah juga sangat diperlukan untuk melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, adakalanya pendapatan daerah yang dianggarkan tidak mampu menutupi semua belanja daerah sehingga terjadi defisit anggaran. Untuk itu pemerintah daerah harus mengupayakan sumber-sumber pembiayaan dan strategi yang tepat untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Pembiayaan daerah berperan dalam semua transaksi keuangan guna menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Hal ini merupakan upaya preventif mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu (Halim, 2016: 184).

Dalam pembiayaan keuangan daerah, pemerintah perlu mengelola setiap penerimaan dan pengeluaran pembiayaan secara bijak atas setiap pengalokasiannya agar tidak terjadi kemungkinan timbulnya kas menganggur (*idle cash*). Kas menganggur ini sering terjadi akibat adanya kelebihan dana pada

pemerintah yang tidak terpakai atau terealisasi, tentu hal ini tidak baik bagi penilaian kinerja pemerintah. Namun apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berperan dalam memenuhi kebutuhan daerah yang masih harus dipenuhi. Oleh karena itu, setiap penerimaan pembiayaan yang diterima oleh pemerintah daerah perlu dialokasikan secara tepat pada sektor yang membutuhkan mengingat setiap penerimaan pembiayaan ini akan dikeluarkan/ dibayarkan kembali. Variabel Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan hanya dilakukan penelitian dalam prespektif teoritis oleh Sihar Simamora (2014) yang menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan berpengaruh terhadap belanja daerah di masa yang akan datang.

Menurut Wikipedia, Pulau Sumatera merupakan pulau keenam terbesar di dunia dengan luas 473.481 km<sup>2</sup>. Sehubungan dengan hal ini, maka setiap pemerintah provinsi se-Sumatera perlu memperhatikan pengalokasian setiap sumber penerimaan yang digunakan sebagai pendanaan bagi setiap belanja atau pengeluaran daerah agar provinsi-provinsi yang ada di Sumatera dapat berkembang pesat. Berikut merupakan grafik Belanja Daerah untuk Pemerintah Provinsi se-Sumatera



*Sumber: data diolah*

**Gambar 1.1**

**Grafik Belanja Daerah Pemerintah Provinsi se-Sumatera**

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Belanja Daerah Pemerintah Provinsi se-Sumatera pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Belanja Daerah pada tahun 2010 sebesar Rp 19.519.110.414.000. sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan mencapai Rp 2.177.130.805.000 menjadi Rp 21.696.241.219.000. Hingga pada tahun 2016 belanja daerah sebesar Rp 41.214.429.791.000 yang mengalami peningkatan hingga Rp 4.829.837.651.000 dari tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung. Peningkatan belanja daerah pada pemerintah provinsi yang ada di Sumatera mengindikasikan bahwa kebutuhan daerah dan pemenuhan layanan publik membutuhkan pendanaan yang cukup. Pemerintah provinsi mempunyai berbagai macam pembiayaan untuk memenuhi belanja daerah baik dari pemerintah pusat maupun pembiayaan daerah yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri. Namun setiap penerimaan yang diperoleh perlu dialokasikan dengan baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan suatu pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan perlu diatur dana perimbangan dan pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum sebagai salah satu dari dana perimbangan dan Pembiayaan Daerah merupakan bagian yang tak kalah penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat yang diwujudkan dalam Belanja Daerah. Namun diperlukan perencanaan yang matang agar realisasi anggaran belanja daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Pembiayaan dialokasikan pada setiap sektor yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Elli Widya dalam bukunya yang berjudul *Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (2013) bahwa bila kita selalu mendengar kata bijak "*You're what you say*", maka kata bijak ini senada dalam pemerintah daerah yaitu "*You're what you*

*spend*”, karena “belanjamu adalah performamu!”. Ketepatan mengalokasikan belanja daerah ternyata berperan besar dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah secara parsial?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah secara simultan?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ruang lingkup pembahasan ini adalah Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pembiayaan berupa Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera periode 2010 sampai dengan 2016.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera periode 2010 sampai dengan 2016 secara parsial.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera periode 2010 sampai dengan 2016 secara simultan.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera dalam mengelola sumber dana untuk digunakan dalam membiayai aktivitas pemerintah dalam penyusunan APBD.
2. Sebagai referensi bagi mahasiswa program studi akuntansi sektor publik Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya dan bagi peneliti berikutnya secara umum terkait dengan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pembiayaan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan penelitian ini secara singkat, yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, peneliti akan mengungkapkan tentang apa yang melatarbelakangi peneliti dalam memilih judul skripsi, perumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan dan manfaat penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, peneliti akan mengungkapkan teori-teori yang terkait dan literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah meliputi Dana Alokasi Umum,

Pembiayaan, dan Belanja Daerah serta mengenai kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan data berupa sampel yang digunakan dalam penelitian dan informasi data-data yang diperlukan dalam melakukan pengujian penelitian seperti jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan dari rumusan masalah yang ada dengan cara menganalisa data yang peneliti dapatkan dari pengumpulan populasi dan sampel berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi yang ada di Sumatera tahun 2010-2016.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dimana peneliti akan memberikan simpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, serta memberikan saran yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan dapat berguna bagi peneliti lain ke depannya.